



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

4.01.32.001

KECAMATAN SUMBANG

KABUPATEN BANYUMAS 2026

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan YME atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2025 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pertunjukan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, maka perangkat daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Banyumas, Januari 2026

CAMAT SUMBANG



Hermawan Novianto, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 197411292002121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan hasil pengukuran, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sumbang pada Tahun 2025 memperoleh predikat **Tidak Tercapai (90.10%)**. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Sumbang Tahun 2025. Secara rinci dapat dijelaskan dari hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumbang dapat disimpulkan sebesar **(90.10%)** dengan kategori "**Tidak Tercapai**"; Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan indikator telah efisien karena indikator kinerja dapat dicapai sebesar 90.10%, dan persentase penyerapan anggaran kurang dari 90.10%.

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2025, Kecamatan Sumbang menetapkan 15 (lima belas) indikator kinerja berupa indikator Tujuan, Sasaran, dan Program yang dapat menunjang tercapainya tujuan organisasi dan telah mencapai target realisasi capaian kinerja dengan rata-rata capaian sebesar **90.10%** dan dengan predikat **Tidak Tercapai**.

Terdapat 8 (delapan) indikator dengan predikat Tercapai, diantaranya : Nilai Maturitas SPIP Kecamatan; Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah; Persentase pemberdayaan masyarakat Desa Dan Kelurahan; Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas; Persentase penanganan pengaduan; Persentase APBDes tepat waktu; Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu. Sementara itu, terdapat 7 (tujuh) indikator yang mendapat predikat **Tidak Tercapai**, yaitu Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan; Indeks Pelayanan Publik Kecamatan; Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan; Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan; Indeks Kepuasan Masyarakat; Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum; Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan.

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Sumbang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas setelah Perubahan dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp 2.571.799.509,-** dan Kecamatan Sumbang telah merealisasikan sebesar **Rp 2.215.400.962,-** atau sebesar **86.14%**. Hal ini menimbulkan selisih anggaran sebesar **Rp 356.332.547,-** yang menunjukkan bahwa Kecamatan Sumbang telah melakukan efisiensi anggaran sebesar **13.86%**. Jika dijelaskan secara rinci, pada sasaran strategis Pemerintah Kecamatan Sumbang dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah

Kecamatan **78.30%** lebih kecil dari persentase realisasi anggaran sebesar **86.14%**. Sedangkan pada sasaran strategis dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan mencapai rata-rata persentase capaian kinerja sebesar **101.9%** lebih besar dari persentase realisasi anggaran sebesar **86.14%**. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Sumbang telah melakukan efisiensi.

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. LATAR BELAKANG 1

 B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 1

 C. SUSUNAN ORGANISASI 4

 D. SUMBER DAYA APARATUR..... 6

 E. ISU STRATEGIS 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 8

 A. RENCANA STRATEGIS 8

 B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 202512

 C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 202514

BAB III 15

 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI15

 B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA17

 C. REALISASI ANGGARAN69

 D. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN70

BAB IV PENUTUP..... 72

 A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA72

 B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS.....73

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan Bupati untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi. Dengan adanya Laporan Kinerja Kecamatan Sumbang, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Kecamatan Sumbang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Kecamatan Sumbang merupakan salah satu Kecamatan dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Kecamatan Sumbang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Kecamatan Sumbang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; JDIH Kabupaten Banyumas
 - 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - 7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

- c. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
- d. Koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati.
- e. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
 - 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada bupati.
- f. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- g. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
 - 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan; dan
 - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan kepada bupati;

- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - 1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah;
- j. Penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

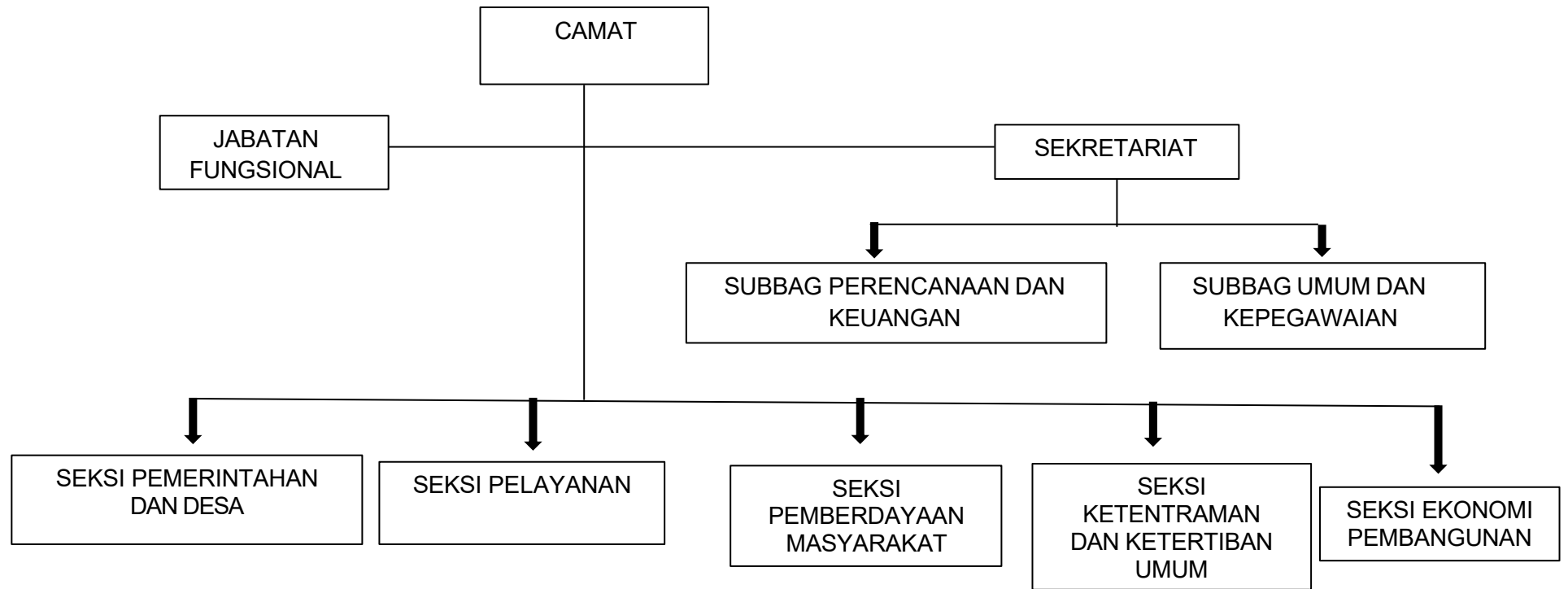
C. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Kecamatan Sumbang terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kecamatan Sumbang (sesuiakan adanya Desa/Kelurahan)



D. SUMBER DAYA APARATUR

Kondisi sumber daya aparatur pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

Tabel. 1.1

Pegawai Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
A. ASN CPNS dan PNS				
Golongan I	0	0	0	0
Golongan II	0	0	0	0
Golongan III	6	2	8	40
Golongan IV	2	0	2	10
B. PPPK				
Golongan I	1	0	1	5
Golongan V	1	0	1	5
Golongan IX	1	0	1	5
C. PPPK Paruh Waktu				
	6	1	7	35
Jumlah			20	100

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2025

2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Jumlah ASN Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 berdasarkan jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2.

ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi %
SD	1		1	5
SMP				
SMA	4		4	20
D-I				
D-II				
D-III				
S-1	11	3	14	70
S-2	1		1	5
S-3				
Jumlah			20	100

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan. Dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu strategis Kecamatan Sumbang Tahun 2024-2025 adalah **“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas”**.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025- 2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Untuk dapat mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan, penyusunan RPD memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah, mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045, serta menyelaraskan dengan kebijakan nasional dan regulasi terkait lainnya.

Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan antara RPD dengan RPJMN dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi dan mendukung pembangunan nasional. Penelaahan dilakukan terhadap isu-isu strategis nasional, arah kebijakan, target indikator makro, dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Provinsi Jawa Tengah secara bersamaan menyusun RPD. Penyusunan RPD Kabupaten Banyumas juga harus memperhatikan RPD Provinsi Jawa sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam RPD Provinsi Jawa Tengah untuk penyusunan RPD antara lain isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan pembangunan kewilayahan, dan indikator serta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Penyusunan RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045. RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJPD tahap keempat untuk mewujudkan Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri pada Tahun 2025. Sasaran dan program prioritas RPJPD Tahap IV menjadi pedoman dalam penyusunan RPD.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 menjadi dasar perencanaan tahunan daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPD dijabarkan dalam RKPD dengan menyelaraskan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program Perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPD.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra PD untuk periode waktu yang sama. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan dan indikasi program serta kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

1. *Visi dan Misi RPJPD Pemkab Banyumas*

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025, dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, khususnya tahapan keempat dalam penyusunannya. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah, sehingga diperlukan pemahaman mengenai Visi RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045. Visi pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 adalah **“BANYUMAS HEBAT”** yaitu **Harmoni bErkelanjutan, Berdaya saing maju, mandiri berbudaya sejahTera**.

Untuk merealisasi Visi Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut di atas, Kabupaten Banyumas menetapkan 6 (enam) Misi, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Transformasi Sosial
Transformasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas SDM serta menurunnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Banyumas diupayakan melalui pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, serta peningkatan perlindungan sosial masyarakat sehingga tercapai SDM Banyumas yang sehat, cerdas, kreatif, berkarakter dan -84 - memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan serta mampu memanfaatkan peluang, sehingga dapat mandiri, berdaya saing, unggul dan berperan aktif dalam pembangunan.
- 2) Mewujudkan Transformasi Ekonomi
Transformasi ekonomi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah melalui perekonomian yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan dengan perluasan kesempatan kerja ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan yang semakin merata dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transformasi ekonomi akan mendorong terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan, yaitu perekonomian yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, memiliki nilai tambah yang tinggi dan berkelanjutan, menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan berusaha, serta mendorong pemerataan

pendapatan.

- 3) **Mewujudkan Transformasi Tata kelola Pemerintahan**
Transformasi tata kelola pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan pelayanan umum di kabupaten Banyumas yang belum optimal dengan ditunjukkan dengan terwujudnya tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif. Transformasi tata kelola pemerintahan menjadi penting dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif dan akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dan kolaboratif, senantiasa bergerak cepat, tanggap dalam menghadapi situasi maupun gejolak apapun dan dapat langsung beradaptasi pada segala bentuk perubahan yang terjadi (lebih agile) dengan tetap menjaga integritas semakin kuat.
- 4) **Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya**
Ketahanan sosial budaya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas SDM yang ditunjukkan dengan meningkatnya ketahanan budaya dan meningkatnya ketahanan keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif. Ketahanan sosial budaya yang merupakan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan yang cepat, dan memanfaatkan peluang yang timbul menjadi sebuah keunggulan dalam mencapai tujuan pembangunan. Dalam konteks pembangunan kebudayaan ketahanan sosial budaya didefinisikan sebagai kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat.
- 5) **Mewujudkan Ketahanan Ekologi**
Ketahanan ekologi bertujuan untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, menjaga kualitas lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana. Pembangunan jangka panjang yang akan datang menghadapi kecenderungan penurunan daya dukung air dan daya dukung pangan, kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim dan bencana menjadi ancaman bagi keberlanjutan generasi dan keberlanjutan pembangunan. Untuk mewujudkan ketahanan ekologi dilaksanakan melalui peningkatan ketahanan air dan pangan, serta lingkungan hidup berkualitas dan resiliensi terhadap bencana, serta perubahan iklim.

- 6) Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkualitas
 Pembangunan wilayah yang merata dan berkualitas diwujudkan melalui kebijakan tata ruang dan pertanahan, pengelolaan infrastruktur dan perkotaan, pembangunan desa dan pusat-pusat pertumbuhan, dan pembangunan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung transformasi sosial dan transformasi ekonomi. Sebagai kerangka implementasi transformasi pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dengan mendorong pengembangan wilayah serta meningkatkan daya saing infrastruktur. Penyediaan infrastruktur bagi masyarakat juga menjadi salah satu prasyarat bagi mendukung aktivitas masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama untuk penyediaan perumahan, permukiman, air minum aman, dan sanitasi layak. Pembangunan infrastruktur tersebut tetap berprinsip pada infrastruktur yang ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sumbang Tahun 2025

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumbang
 Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	SUMBER DATA DAN PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan kecamatan = 50% x capaian sasaran pelayanan kecamatan + 50% x Capaian akuntabilitas pemerintahan kecamatan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumbang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN
SUMBANG TAHUN 2025

No	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FORMULASI
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan kecamatan = 50% x capaian sasaran pelayanan kecamatan + 50% x Capaian akuntabilitas pemerintahan kecamatan
2	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	83,2	Nilai SAKIP Kecamatan
		Nilai SPIP	3,307	Nilai SPIP Kecamatan
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	100%	(20%*realisasi program pengawasan desa)+(20%*realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik)+(20%*realisasi program pemberdayaan masyarakat)+(20%*realisasi program trantibum)+(20%*realisasi program pemerintahan umum)
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,51	Nilai IPP Kecamatan
4	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	93 Indeks	Nilai IKM Kecamatan
5	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan

No	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FORMULASI
6	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100%	Jumlah gangguan trantibumlinmas yang ditangani/Jumlah gangguan trantibumlinmas yang terjadi*100%
		Presentase Penanganan Pengaduan	100%	Jumlah penanganan pengaduan yang ditangani/Jumlah pengaduan*100%
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100%	Urusan penugasan yang dilaksanakan/urusan penugasan yang direncanakan*100%
		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%	Urusan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan/urusan fasilitasi dan koordinasi yang direncanakan*100%
8	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase APBDes tepat waktu	100%	APBDes tepat waktu / Total APBDes*100%
		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100%	Urusan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan/urusan fasilitasi dan koordinasi yang direncanakan*100%
		Persentase RKPDes Tepat Waktu	100%	RKPDes tepat waktu / Total RKPDes*100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Sumbang Tahun 2025

C. **RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025**

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sumbang pada tahun 2023 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Sumbang setelah perubahan sebesar **Rp 2.860.907.097** dengan komposisi anggaran belanja operasional **Rp 2.825.607.441** dan anggaran belanja modal sebesar **Rp 50.000.000** Adapun komposisi belanja untuk masing-masing program, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Rencana Anggaran Per Program Tahun 2025	
PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.534.010.759
2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	5.940.000
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.438.750
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	17.480.000
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.970.000
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.960.000
Jumlah	2.571.799.509

Sumber : Subbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Sumbang, 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Kecamatan Sumbang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumbang Tahun 2025.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Hasil pengukuran atas indikator kinerja Kecamatan Sumbang Tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100%	90.1025	90.1	Tidak tercapai
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	2.16	61.54	Tidak tercapai
		Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100%	95.072	95.07	Tidak tercapai
3	Meningkatkan akuntabilitas	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Angka	3,307	3.526	106.62	Tercapai

No	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
	pemerintah kecamatan	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Angka	83,20	80.85	97.18	Tidak Tercapai
3	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100%	75	75	Tidak Tercapai
		Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100%	75	75	Tidak Tercapai
4	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100%	111.115	111.11	Tercapai
5	Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100%	100	100	Tercapai
		Persentase penanganan pengaduan	%	100%	100	100	Tercapai
6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	93	83	89.25	Tidak Tercapai
7	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes tepat waktu	%	100%	100	100	Tercapai
		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100%	100	100	Tercapai
		Persentase Penyusunan RKPDes	%	100%	100	100	Tercapai

No	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
		tepat waktu					
8	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100%	111.56	111.56	Tercapai
	Rata-Rata Capaian				1.412,43	94.162	

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumbang tahun 2025 adalah sebesar **94.162%**.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025.
Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja tujuan **Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas** tahun 2025 ditampilkan pada table 3.1.a sebagai berikut :

Tabel 3.1.a

Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025
dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	90.1025	90.1

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa realisasi belum mencapai target dimana target yang ditetapkan adalah 100% namun capaian yang diperoleh hanya 90.1%. Angka tersebut diperoleh melalui formulasi perhitungan sebagai berikut:

Persentase capaian kinerja penyelenggaraan kecamatan =
 $(50\% \times \text{capaian sasaran pelayanan kecamatan}) + (50\% \times \text{Capaian akuntabilitas pemerintahan kecamatan}) = 50\% \times ((95.07+61.54)/2) + 50\% \times ((97.18+106.62)/2)) = 39.1525\% + 50.95\% = 90.1025\%.$
 Sumber data tersebut diperoleh dari laporan e-Monev Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya

Tabel 3.2.a
 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	98.727	98.73
Tahun 2025				
Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	90.1025	90.1

Pada Indikator Kinerja diatas tidak terdapat pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Hal ini dikarenakan Tujuan pada RPD berbeda dengan tahun 2024 dan 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra Perbandingan realisasi indikator kinerja tujuan **Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas** tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.3.a sebagai berikut :

Tabel 3.3.a

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2026
		Target	Realisasi	%		
Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	90.1025	90.1	100	90.1

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja pada tahun 2025 yaitu 90.1%. Dimana angka tersebut belum mencapai target akhir Renstra yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.4.a sebagai berikut :

Tabel 3.4.a

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	90.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja diatas, diketahui bahwa angka Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan memperoleh nilai 90.1. Sementara nilai pada standar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten tetangga tidak dapat diketahui (N/A). Sehingga nilai yang diperoleh Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tidak dapat dibandingkan dengan standar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten tetangga lainnya.

e. Penyebab kegagalan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Capaian akuntabilitas pemerintah Kecamatan Sumbang yang belum memenuhi target

Solusi yang akan dilakukan dalam pencapaian target adalah

- 1) Meningkatkan akuntabilitas dari segala aspek yang ada pada penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sumbang.
- 2) Menginformasikan laporan kinerja tepat waktu kepada masyarakat maupun stakeholder.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Sumbang telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Sumbang untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Sumbang dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Sumbang dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.5.a
Capaian Efisiensi Anggaran Kecamatan Sumbang Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran Awal (Induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.780.413.631	2.534.010.759	(246.402.872)
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	23.760.000	5.940.000	(17.820.000,)
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	29.800.000	7.438.750	(22.361.250)
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	61.920.000	17.480.000	(44.440.000)
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	15.840.000	3.960.000	(11.880.000)
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.880.000	2.970.000	(8.910.000)
			Efisiensi	(351.814.122)

Sumber : DPA Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Sumbang.

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas antara lain :

Tabel 3.6
Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Keuangan

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi keuangan (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	111,56	86,28
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,25	37,88
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat Desa Dan Kelurahan	111,11	90,59
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100	90,82
		Persentase penanganan pengaduan	100	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	75,00	70,08
		Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	75,00	
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes tepat waktu	100	50,51
		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100	
		Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu	100	

Sumber : SIPD dan Emonev Kecamatan Sumbang 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 pada setiap program mencapai 75% sampai dengan 111,56%. Apabila dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran tahun 2025, ada beberapa program yang realisasi anggarannya lebih kecil prosentasenya

dibandingkan dengan realisasi kinerja. Maka dapat disimpulkan terdapat efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan penjelasan dibawah ini:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Program ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan, terdiri atas 6 kegiatan dan 21 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.534.010.759 dengan realisasi sebesar Rp2.186.262.462 dengan tingkat capaian sebesar 86,28%.
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
Program ini bertujuan Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik, terdiri atas 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.940.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.250.000 dengan tingkat capaian sebesar 37,88% .
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.
Program ini bertujuan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri atas 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.438.750 dengan realisasi sebesar Rp 6.738.500 dengan tingkat capaian sebesar 90,59%.
- 4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
Program ini bertujuan Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan, terdiri atas 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17.480.000 dengan realisasi sebesar Rp 15.875.000 dengan tingkat capaian sebesar 90,82%.
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
Program ini bertujuan Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri atas 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.960.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.775.000 dengan tingkat capaian sebesar 70.08% .
- 6) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
Program ini bertujuan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, terdiri atas 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp Rp 2.970.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.500.000 dengan tingkat capaian sebesar 50.51% .

1. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan** tahun 2025 ditampilkan pada table 3.1.b. sebagai berikut :

Tabel 3.1.b
Perbandingan target dan Realisasi Kinerja
Kecamatan Sumbang tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Angka	3,51	2,61	61.54
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	95.072	95.07

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa realisasi belum mencapai target dimana target yang ditetapkan adalah 3.51 dan 100% sementara capaian yang diperoleh sebesar 2,61 dan 95, 07%. Angka tersebut diperoleh melalui formulasi perhitungan sebagai berikut:

1. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan = Hasil penilaian IPP Kecamatan Sumbang sebesar 2.16 yang masuk dalam kategori "Cukup"
2. Persentase capaian kinerja penyelenggaraan kecamatan =

$$\begin{aligned} & (20\% \times \text{realisasi program pembinaan dan pengawasan desa}) + \\ & (20\% \times \text{realisasi program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum}) + (20\% \times \text{realisasi program trantibum}) + (20\% \times \text{realisasi program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan}) + (20\% \times \text{realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik}) = (20\% \times (100+100+100/3)) + (20\% \times (75+75/2)) + (20\% \times (100+100)/2) + (20\% \times 111.11) + (20\% \times 89.25) = 20 + 15 + 20 + 22.222 + 17.85 = 95.072\% \end{aligned}$$

Sumber data tersebut diperoleh dari laporan e-Monev Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya .

Tabel 3.2.b

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	101.704	101.7
Tahun 2025				
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Angka	3,51	2,16	61.53
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	95.07	95.07

Pada Indikator Kinerja diatas tidak terdapat pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Hal ini dikarenakan Sasaran pada RPD berbeda dengan tahun 2025.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra Perbandingan realisasi indikator kinerja Sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan** tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.3.b sebagai berikut :

Tabel 3.3.b

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Angka	3,51	2,16	61.53	3.51	61.53
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	95.072	95.07	100	95.07

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja pada tahun 2025 yaitu 61.53 dan 95.07%. Dimana angka tersebut belum mencapai target akhir Renstra yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3,51 dan 100%.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.4.b sebagai berikut :

Tabel 3.4.b

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	2,16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah	95.07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

kecamatan							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja diatas, diketahui bahwa angka Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan memperoleh nilai 95.07. Sementara nilai pada standar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten tetangga tidak dapat diketahui (N/A). Sehingga nilai yang diperoleh Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tidak dapat dibandingkan dengan standar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten tetangga lainnya.

e. Penyebab kegagalan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Tidak dilaksanakannya evaluasi rutin terhadap program dan layanan yang diberikan
- 2) Efisiensi anggaran pada beberapa program sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- 3) Inovasi pelayanan belum dilaksanakan dengan maksimal

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah

- 1) Melakukan upaya peningkatan fasilitas pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- 2) Melaksanakan evaluasi kinerja secara rutin dan berkelanjutan pada setiap program kegiatan yang dilaksanakan.
- 3) Mematuhi SOP yang telah dibuat dalam pelaksanaan kinerja agar mendapatkan hasil sesuai dengan target yang telah ditentukan.
- 4) Tetap memaksimalkan kinerja dan kegiatan dengan anggaran yang sudah ditentukan

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Sumbang telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Sumbang untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Sumbang dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja sasaran Kecamatan Sumbang dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.5.b
Capaian Efisiensi Anggaran Kecamatan Sumbang Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran Awal (Induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	23.760.000	5.940.000	(17.820.000,)
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	29.800.000	7.438.750	(22.361.250)
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	61.920.000	17.480.000	(44.440.000)
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	15.840.000	3.960.000	(11.880.000)
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.880.000	2.970.000	(8.910.000)
			Efisiensi	(105.411.250)

Sumber : DPA Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Sumbang.

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan antara lain :

Tabel 3.6.b
Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan pada Sasaran

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi keuangan (%)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,25	37,88
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat Desa Dan Kelurahan	111,11	90,59
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100	90,82
		Persentase penanganan pengaduan	100	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	75,00	70,08
		Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	75,00	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes tepat waktu	100	50,51
		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100	
		Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu	100	

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 pada setiap program mencapai 75% sampai dengan 111.11%. Apabila dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran tahun 2025, ada beberapa program yang realisasi anggarannya lebih kecil prosentasenya dibandingkan dengan realisasi kinerja. Maka dapat disimpulkan terdapat efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan penjelasan dibawah ini:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. Program ini bertujuan Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik, terdiri atas 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.940.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.250.000 dengan tingkat capaian sebesar 37,88% .
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.
Program ini bertujuan Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri atas 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.438.750 dengan realisasi sebesar Rp 6.738.500 dengan tingkat capaian sebesar 90,59% .
- 3) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
Program ini bertujuan Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan, terdiri atas 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17.480.000 dengan realisasi sebesar Rp 15.875.000 dengan tingkat capaian sebesar 90,82%.
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
Program ini bertujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri atas 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.960.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.775.000 dengan tingkat capaian sebesar 70.08% .
- 5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
Program ini bertujuan Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, terdiri atas 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp Rp 2.970.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.500.000 dengan tingkat capaian sebesar 50.51% .

2. Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Sasaran **Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan** tahun 2025 ditampilkan pada table 3.1.c sebagai berikut :

Tabel 3.1.c

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dan tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Nilai	3.307	3.526	106.62
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	86.15	80.85	97.18

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa realisasi Nilai Maturitas SPIP Kecamatan sudah mencapai target dimana target yang ditetapkan adalah 3.307 dan nilai capaian realisasi sebesar 3.526. Namun capaian realisasi pada Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan belum tercapai dengan target yang ditetapkan sebesar 86.15 yang diperoleh hanya 80.85 dimana angka tersebut diperoleh melalui penilaian LHE SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas.

Penyebab tidak tercapainya target adalah dikarenakan Dokumen perencanaan Tahun 2025 masih terdapat kelemahan secara kualitas dan kemanfaatannya; Pengukuran kinerja terdapat kelemahan terkait akurasi dan keandalan data; Dokumen pelaporan kinerja tahun 2024 terdapat informasi yang dilaporkan namun belum lengkap dan komprehensif menggambarkan kondisi yang sebenarnya; Evaluasi kinerja internal tahun 2024 belum dilakukan dengan pendalaman yang memadai dan hasilnya belum dioptimalkan sebagai bahan perbaikan. Beberapa hal tersebut adalah faktor kegagalan tercapainya target pada Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan.

Sumber data tersebut diperoleh dari laporan e-Monev dan LHE SAKIP Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya .

Tabel 3.2.c

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	85.95	82.3	95.75
Tahun 2025				
Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Nilai	3.307	3.526	106.62
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	85.95	82.3	95.75

Pada Indikator Kinerja diatas tidak terdapat pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Hal ini dikarenakan Tujuan pada RPD berbeda dengan tahun 2025.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra Perbandingan realisasi indikator kinerja Sasaran **Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan** tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.3.c sebagai berikut :

Tabel 3.3.c

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Nilai	3.307	3.526	106.62	3.307	106.62
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	85.95	82.3	95.75	86.15	95.75

Capaian kinerja pada tahun 2025 yaitu 106.62 dan 95.75. Dimana angka tersebut ada yang sudah dan ada yang belum mencapai target akhir tahun 2025 dan akhir Renstra yang telah ditetapkan.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.4.c sebagai berikut :

Tabel 3.4.c
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	3.526	3.00	3.00	3,174	3.079	N/A	3,19
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	80.85	70,01	82,63	66,86	72,40	81,80	72,50

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja diatas, diketahui bahwa angka Nilai Maturitas SPIP Kecamatan memperoleh nilai 3.526. Angka tersebut lebih besar dari standar nilai nasional dan provinsi. Dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, nilai SPIP Kecamatan memperoleh nilai yang lebih tinggi. Sementara itu Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan memperoleh nilai 80.85. Sementara nilai pada standar Nasional sebesar 70.01, Provinsi sebesar 82.63, dan Kabupaten tetangga 66.86 sampai 81.80. Sehingga nilai yang diperoleh Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas diatas dari Nilai SAKIP standar Nasional, Provindi Jawa Tengah, dan Kabupaten Tetangga sekitarnya kecuali kabupaten Cilacap.

- e. Penyebab kegagalan dalam pencapaian target adalah :
 - 1) Dokumen perencanaan Tahun 2025 masih terdapat kelemahan secara kualitas dan kemanfaatan
 - 2) Pengukuran kinerja terdapat kelemahan terkait akurasi dan keandalan data
 - 3) Dokumen pelaporan kinerja tahun 2024 terdapat informasi yang dilaporkan namun belum lengkap dan komprehensif menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
 - 4) Evaluasi kinerja internal tahun 2024 belum dilakukan dengan

pendalaman yang memadai dan hasilnya belum dioptimalkan sebagai bahan perbaikan.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target

- 1) Melakukan upaya perbaikan pada dokumen perencanaan sesuai dengan standar yang telah ditentukan
- 2) Melakukan upaya perbaikan pada Laporan kinerja dengan menginformasikan upaya dan hambatan yang dilakukan
- 3) Mempublikasikan seluruh dokumen kinerja dengan tepat waktu
- 4) Melakukan upaya implementasi SAKIP pada komponen evaluasi kinerja internal agar memberikan dampak yang signifikan

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Sumbang telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Sumbang untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Sumbang dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Sumbang dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.5.c
Capaian Efisiensi Anggaran Kecamatan Sumbang Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran Awal (Induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.780.413.631	2.534.010.759	(246.402.872)
			Efisiensi	(246.402.872)

Sumber : DPA Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Sumbang.

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas antara lain :

Tabel 3.6.c
Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Keuangan

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi keuangan (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	111.56	86.28

Sumber : SIPD dan Emonev Kecamatan Sumbang 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 pada setiap program mencapai 100% sampai dengan 111.56%. Apabila dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran tahun 2025, ada beberapa program yang realisasi anggarannya lebih kecil prosentasenya dibandingkan dengan realisasi kinerja. Maka dapat disimpulkan terdapat efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan penjelasan dibawah ini:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan, terdiri atas 6 kegiatan dan 21 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.534.010.759 dengan realisasi sebesar Rp2.186.262.462 dengan tingkat capaian sebesar 86,28%.

3. Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik tahun 2025 ditampilkan pada table 3.1.d sebagai berikut :

Tabel 3.1.d Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dan tahun 2025				
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	93	83	89.25

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa realisasi sudah mencapai target dimana target yang ditetapkan adalah 93 dan capaian yang diperoleh 83. Angka tersebut diperoleh dari aplikasi Susanmas Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Sumber data tersebut diperoleh dari laporan e-Monev dan Susanmas Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya .

Tabel 3.2.d Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 s.d 2025				
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	90	105.88
Tahun 2023				
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86	81	94.18
Tahun 2024				

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91	98.75	108.51
Tahun 2025				
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	93	83	89.25

- Berdasarkan angka capaian Indeks Kepuasan Masyarakat diatas, diketahui bahwa tahun 2025 mendapatkan angka yang lebih rendah dari tahun 2022 hingga 2024 dan belum mencapai atau melebihi target yang ditentukan.
- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra Perbandingan realisasi indikator kinerja Program **Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik** tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.3.d sebagai berikut :

Tabel 3.3.d
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	93	83	89.25	93	89.25

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

- Capaian kinerja pada tahun 2025 yaitu 89.25%. Dimana angka tersebut belum mencapai target akhir Renstra yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)
- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.4.d sebagai berikut :

Tabel 3.4.d
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Indeks Kepuasan Masyarakat	83	N/A	88	87,887	85.50	98.49	95.69

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja diatas, diketahui bahwa angka Persentase Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat memperoleh nilai 83. Sehingga nilai yang diperoleh Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara, Cilacap, Kebumen dan Kabupaten Purbalingga.

- e. Penyebab Kegagalan dalam pencapaian target adalah :
- 1) Terhambatnya kesediaan Blanko dalam pencetakan E-KTP sehingga pelayanan kurang maksimal dan efesien
 - 2) Inovasi pelayanan yang belum dijalankan secara maksimal
 - 3) Kurangnya peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
 - 4) Tidak adanya mesin antrean karena minimnya anggaran dalam penyediaan mesin antrean

Solusi yang akan dilakukan dalam pencapaian target adalah

- 1) Melakukan upaya peningkatan fasilitas yang efektif dan efesien
- 2) Melaksanakan evaluasi kinerja secara rutin dan berkelanjutan pada setiap program kegiatan yang dilaksanakan
- 3) Mematuhi SOP yang telah dibuat dalam pelaksanaan kinerja pelayanan masyarakat agar mendapatkan hasil sesuai dengan harapan masyarakat

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Selama Tahun 2025 Kecamatan Sumbang telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:
- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Sumbang untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
 - 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
 - 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Sumbang dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
 - 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Sumbang dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.5.d
Capaian Efesiensi Anggaran Kecamatan Sumbang Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran Awal (Induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	23.760.000	5.940.000	(17.820.000)
			Efisiensi	(17.820.000)

Sumber : DPA Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Sumbang.

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik antara lain :

Tabel 3.6.d
Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan pada Program

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan	200%	98.48%
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	100%	90.91%
		Persentase pelaksanaan Pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
3.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	100%	18.94%
4.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	0%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 pada kegiatan didalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik menghasilkan persentase yang lebih besar dan atau sama dengan realisasi keuangan. Maka dapat disimpulkan terdapat efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan penjelasan dibawah ini:

- 1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Kegiatan ini bertujuan Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik terdiri atas 1 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.400.000 dengan realisasi sebesar Rp 4.950.000 dengan tingkat capaian sebesar 91.67%.
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- 3) Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- 4) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Program **Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan** tahun 2025 ditampilkan pada table 3.1.e sebagai berikut :

Tabel 3.1.e				
Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025				
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	111.115	111.11

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa realisasi sudah mencapai target dimana target yang ditetapkan adalah 100% dan capaian yang diperoleh sebesar 111.11%. Angka tersebut diperoleh melalui formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah capaian seluruh kegiatan/Jumlah seluruh kegiatan = (122.23% + 100%) / 2= 111.115%

Sumber data tersebut diperoleh dari laporan e-Monev Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya .

Tabel 3.2.e				
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 s.d 2025				
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2025				
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	111.115	111.11

Pada Indikator Kinerja diatas tidak terdapat pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Hal ini dikarenakan Tujuan pada RPD berbeda dengan tahun 2024 dan 2025.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra Perbandingan realisasi indikator kinerja Program **Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan** tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.3.e sebagai berikut :

Tabel 3.3.e

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	111.115	111.11	100	111.11

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja pada tahun 2025 yaitu 111.11%. Dimana angka tersebut sudah mencapai target akhir Renstra yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.4.e sebagai berikut :

Tabel 3.4.e
 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	111.115	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja diatas, diketahui bahwa angka Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan memperoleh nilai 111.115. Sementara nilai pada standar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten tetangga tidak dapat diketahui (N/A). Sehingga nilai yang diperoleh Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tidak dapat dibandingkan dengan standar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten tetangga lainnya.

- e. Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target adalah :
- 1) Secara rutin melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
 - 2) Masyarakat turut aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan.
 - 3) Menciptakan inovasi untuk membangun pemberdayaan masyarakat disetiap desa.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah

- 1) Melakukan evaluasi secara rutin terhadap kegiatan yang menunjang program pemberdayaan masyarakat.
- 2) Selalu menghimbau masyarakat agar selalu aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap inovasi yang telah diterapkan apakah berdampak efektif dan efesien atau sebaliknya.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Sumbang telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Sumbang untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Sumbang dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Sumbang dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.5.e
Capaian Efisiensi Anggaran Kecamatan Sumbang Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran Awal (Induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	29.800.000	7.438.750	(22.361.250)
			Efisiensi	(22.361.250)

Sumber : DPA Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Sumbang.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan antara lain :

Tabel 3.6.e
 Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan pada Program

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	100%	85.02%
2.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	122.23%	94.29%

Sumber : *E-monev dan Jegos Kecamatan Sumbang 2025*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 pada kegiatan didalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan menghasilkan persentase yang lebih besar dari presentase realisasi keuangan. Maka dapat disimpulkan terdapat efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan penjelasan dibawah ini:

- 1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 Kegiatan ini bertujuan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri atas 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.468.750 dengan realisasi sebesar Rp 4.213.500 dengan tingkat capaian sebesar 94.29%.
- 2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 Kegiatan ini bertujuan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri atas 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.970.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.525.00 dengan tingkat capaian sebesar 85.02%.

5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025.
- Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Program **Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum** tahun 2025 ditampilkan pada table 3.1.f sebagai berikut :

Tabel 3.1.f
 Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025
 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100
Persentase penanganan pengaduan	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa realisasi sudah mencapai target dimana target yang ditetapkan adalah 100% dan capaian yang diperoleh 100%. Angka tersebut diperoleh melalui formulasi perhitungan sebagai berikut:

1. Jumlah gangguan trantibumlinmas yang ditangani/Jumlah gangguan trantibumlinmas yang terjadi x 100%= 3 : 3 x 100% = 100%.
2. Jumlah pengaduan masuk yang tertangani dibagi jumlah seluruh pengaduan yang masuk dikali 100 = 42/42 x 100 = 100

Sumber data tersebut diperoleh dari laporan e-Monev Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya .

Tabel 3.2.f
 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100
Tahun 2025				
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase penanganan pengaduan	%	100	100	100

Pada Indikator Kinerja diatas tidak terdapat pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Hal ini dikarenakan Tujuan pada RPD berbeda dengan tahun 2025.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra Perbandingan realisasi indikator kinerja Program **Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum** tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.3.f sebagai berikut :

Tabel 3.3.f

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100	100	100
Persentase penanganan pengaduan	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja pada tahun 2025 yaitu 100%. Dimana angka tersebut sudah mencapai target akhir Renstra yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4.f
 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase penanganan pengaduan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja diatas, diketahui bahwa angka Persentase Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas memperoleh nilai 100. Sementara nilai pada standar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten tetangga tidak dapat diketahui (N/A). Sehingga nilai yang diperoleh Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tidak dapat dibandingkan dengan standar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten tetangga lainnya.

- e. Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target adalah :
- 1) Secara rutin melakukan rapat koordinasi dengan Forkompincam berkaitan dengan terjadinya gangguan trantibumlinmas
 - 2) Mengidentifikasi kendala dan segera melakukan penanganan.
 - 3) Meningkatkan kewaspadaan terhadap trantibum secara teratur

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah

- 1) Melakukan evaluasi terhadap penanganan trantibum yang sudah dilaksanakan
 - 2) Melaksanakan evaluasi kinerja secara rutin dan berkelanjutan pada setiap kejadian
 - 3) Mematuhi SOP yang telah dibuat dalam penanganan trantibum
 - 4) Selalu memberikan informasi dan arahan kepada warga maupun Forkompincam dalam penanganan gangguan trantibum
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Selama Tahun 2025 Kecamatan Sumbang telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:
- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Sumbang untuk meningkatkan pelayanan publik kepada

- masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
 - 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Sumbang dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
 - 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Sumbang dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.5.f
 Capaian Efisiensi Anggaran Kecamatan Sumbang Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran Awal (Induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	61.920.000	17.480.000	(44.440.000)
			Efisiensi	(44.440.000)

Sumber : DPA Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Sumbang.

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas antara lain :

Tabel 3.6.f
Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan pada Program

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100%	96.27%
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%	0%

Sumber : *E-monev dan Jegos Kecamatan Sumbang 2025*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 pada kegiatan didalam Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum menghasilkan persentase yang lebih besar dari realisasi keuangan. Maka dapat disimpulkan terdapat efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan penjelasan dibawah ini:

- 1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Kegiatan ini bertujuan Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan terdiri atas 2 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16.490.000 dengan realisasi sebesar Rp 15.875.000 dengan tingkat capaian sebesar 96.27%.
- 2) Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Kegiatan ini bertujuan Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan terdiri atas 1 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 990.000 dengan realisasi sebesar Rp 0,- dengan tingkat capaian sebesar 0%.

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** tahun 2025 ditampilkan pada table 3.1.g sebagai berikut :

Tabel 3.1.g
Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025
dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	75	75
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	75	75

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa realisasi sudah mencapai target dimana target yang ditetapkan adalah 100% dan capaian yang diperoleh 75%. Angka tersebut diperoleh melalui formulasi perhitungan sebagai berikut:

1. Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang direncanakan dikali 100 $\frac{3}{4} \times 100 = 75\%$
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Urusan penugasan yang dilaksanakan/urusan penugasan yang direncanakan $\times 100\% = \frac{3}{4} \times 100 = 75\%$

Sumber data tersebut diperoleh dari laporan e-Monev Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya .

Tabel 3.2.g
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100
Tahun 2025				
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	75	75
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	75	75

Pada Indikator Kinerja diatas tidak terdapat pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Hal ini dikarenakan Tujuan pada RPD berbeda dengan tahun 2025.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra Perbandingan realisasi indikator kinerja **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3.g

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	75	75	100	75
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	75	75	100	75

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja pada tahun 2025 yaitu 75%. Dimana angka tersebut belum mencapai target akhir Renstra yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.4.g sebagai berikut :

Tabel 3.4.g
 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja diatas, diketahui bahwa angka Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan memperoleh nilai 75. Sementara nilai pada standar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten tetangga tidak dapat diketahui (N/A). Sehingga nilai yang diperoleh Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tidak dapat dibandingkan dengan standar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten tetangga lainnya.

- e. Penyebab kegagalan dalam pencapaian target adalah :
- 1) Belum melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang menunjang program secara rutin .
 - 2) Efesiensi anggaran besar-besaran sehingga rencana kegiatan tidak bisa berjalan dengan maksimal.

Solusi yang akan dilakukan dalam pencapaian target adalah

- 1) Melakukan upaya peningkatan kegiatan pemerintahan yang efektif dan efesien
 - 2) Melaksanakan evaluasi kinerja secara rutin dan berkelanjutan pada setiap program kegiatan yang dilaksanakan
 - 3) Mematuhi SOP yang telah dibuat dalam pelaksanaan kinerja agar mendapatkan hasil sesuai dengan target
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Selama Tahun 2025 Kecamatan Sumbang telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:
- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Sumbang untuk meningkatkan pelayanan publik kepada

- masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
 - 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Sumbang dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
 - 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Sumbang dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.5.g
 Capaian Efisiensi Anggaran Kecamatan Sumbang Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran Awal (Induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	15.840.000	3.960.000	(11.880.000)
			Efisiensi	(11.880.000)

Sumber : DPA Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Sumbang.

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas antara lain :

Tabel 3.6.g
 Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan pada Program

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	75%	70.08%

Sumber : *E-monev dan Jegos Kecamatan Sumbang 2025*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 pada kegiatan didalam Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum menghasilkan persentase yang sama besar dengan realisasi keuangan. Maka dapat disimpulkan terdapat efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan penjelasan dibawah ini:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 Kegiatan ini bertujuan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa terdiri atas 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.960.000 dengan realisasi sebesar Rp2.775.000 dengan tingkat capaian sebesar 70.08%.

7. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa** tahun 2025 ditampilkan pada table 3.1.h sebagai berikut :

Tabel 3.1.h

Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025
dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100	100
Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa realisasi sudah mencapai target dimana target yang ditetapkan adalah 100% dan capaian yang diperoleh 100%. Angka tersebut diperoleh melalui formulasi perhitungan sebagai berikut:

1. Jumlah Desa yang mendapatkan APBDes Tepat waktu: Jumlah Desa yang ada di Kecamatan Sumbang x 100 = Desa Silado; Karangturi; Karangcegak; Sumbang; Tambaksogra; Kebanggan; Kawungcarang; Karanggintung; Datar; Banjarsari Kulon; Banjarsari Wetan; Banteran; Ciberem; Susukan; Sikapat; Gandatapa; Kotayasa; Limpakuwus; Kedungmalang Trw. 4= 19 : 19 x 100 = 100
2. Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dibagi jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan dikali 100 19/19x100 = 100

Sumber data tersebut diperoleh dari laporan e-Monev Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya .

Tabel 3.2.h
 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100
Tahun 2025				
Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100	100
Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu	%	100	100	100

Pada Indikator Kinerja diatas tidak terdapat pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Hal ini dikarenakan Tujuan pada RPD berbeda dengan tahun 2025.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra Perbandingan realisasi indikator kinerja **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa** tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.3.h sebagai berikut :

Tabel 3.3.h

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase APBDDes tepat waktu	%	100	100	100	100	100
Persentase Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100
Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja pada tahun 2025 yaitu 100%. Dimana angka tersebut sudah mencapai target akhir Renstra yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.4.h sebagai berikut :

Tabel 3.4.h

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase APBDDes tepat waktu	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja diatas, diketahui bahwa angka Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan memperoleh nilai 100. Sementara nilai pada standar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten tetangga tidak dapat diketahui (N/A). Sehingga nilai yang diperoleh Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tidak dapat dibandingkan dengan standar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten tetangga lainnya.

e. Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Mengelola APBDes tepat waktu.
- 2) Melakukan BinteK, Rapat, dan Koordinasi Bersama pemerintahan desa dalam pengelolaan APBDes agar tepat sasaran, akuntabel, dan transparan.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah

- 1) Melakukan upaya peningkatan inovasi dan pemanfaatan APBDes yang efektif.
- 2) Melaksanakan evaluasi kinerja secara rutin dan berkelanjutan pada setiap program kegiatan yang berkaitan dengan APBDes
- 3) Mematuhi SOP yang telah dibuat dalam pelaksanaan kinerja agar mendapatkan hasil sesuai dengan target

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Sumbang telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Sumbang untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Sumbang dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Sumbang dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.5.h
 Capaian Efisiensi Anggaran Kecamatan Sumbang Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran Awal (Induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.880.000	2.970.000	(8.910.000)
			Efisiensi	(8.910.000)

Sumber : DPA Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Sumbang.

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas antara lain :

Tabel 3.6.h
 Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan pada Program

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100%	50.51%

Sumber : *E-monev dan Jegos Kecamatan Sumbang 2025*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 pada kegiatan didalam Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa menghasilkan persentase lebih besar dari realisasi keuangan. Maka dapat disimpulkan terdapat efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan penjelasan dibawah ini:

- 1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Kegiatan ini bertujuan Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa terdiri atas 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.970.000 dengan realisasi sebesar Rp1.500.000 dengan tingkat capaian sebesar 50.51%.

8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025.
- Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** tahun 2025 ditampilkan pada table 3.1.i sebagai berikut :

Tabel 3.1.i Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025				
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	111.56	111.56

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa realisasi sudah mencapai target dimana target yang ditetapkan adalah 100% dan capaian yang diperoleh 111.56%. Angka tersebut diperoleh melalui formulasi perhitungan sebagai berikut:

Rata- rata presentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah = (120% + 95.84% + 153.57% + 100% + 100% + 100%) / 6 =669.41/6= 111.56%

Sumber data tersebut diperoleh dari laporan e-Monev Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya .

Tabel 3.2.i

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	109.74	109.74
Tahun 2025				
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	111.56	111.56

Pada Indikator Kinerja diatas tidak terdapat pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Hal ini dikarenakan Tujuan pada RPD berbeda dengan tahun 2024 dan 2025.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra Perbandingan realisasi indikator kinerja **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.3.i sebagai berikut :

Tabel 3.3.i

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	111.56	111.56	100	111.56

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja pada tahun 2025 yaitu 111.56%. Dimana angka tersebut sudah mencapai target akhir Renstra yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb).
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.4.i sebagai berikut :

Tabel 3.4.i
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	111.56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja diatas, diketahui bahwa angka Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan memperoleh nilai 111.56. Sementara nilai pada standar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten tetangga tidak dapat diketahui (N/A). Sehingga nilai yang diperoleh Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tidak dapat dibandingkan dengan standar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten tetangga lainnya.

- e. Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target adalah :
- 1) Secara rutin melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang menunjang program dan indikator.
 - 2) Mengidentifikasi kendala dan segera melakukan perbaikan.
 - 3) Meningkatkan kualitas layanan penunjang urusan perangkat daerah.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah

- 1) Melaksanakan evaluasi kinerja secara rutin dan berkelanjutan pada setiap kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan.
- 2) Mematuhi SOP yang telah dibuat dalam pelaksanaan kinerja agar mendapatkan hasil sesuai dengan target.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Selama Tahun 2025 Kecamatan Sumbang telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:
- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Sumbang untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
 - 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
 - 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Sumbang dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
 - 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Sumbang dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.5.i
Capaian Efisiensi Anggaran Kecamatan Sumbang Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran Awal (Induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.780.413.631	2.534.010.759	(246.402.872)
			Efisiensi	(246.402.872)

Sumber : DPA Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Sumbang.

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas antara lain :

Tabel 3.6.i
Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan pada Program

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	94.12 %
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	153.57 %	92.68%
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%	98.84%
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100%	97.77%
5.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120%	100%
6.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	95.84%	82.02%

Sumber : *E-monev dan Jegos Kecamatan Sumbang 2025*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 pada kegiatan didalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menghasilkan persentase lebih besar dari realisasi keuangan. Maka dapat disimpulkan terdapat tidak efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan penjelasan dibawah ini:

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini bertujuan Optimalnya Kinerja Pelayanan Penunjang Pemerintahan Kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa terdiri atas 5 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 90.750.000 dengan realisasi sebesar Rp 85.411.308 dengan tingkat capaian sebesar 94.12 %.
- 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan ini bertujuan Optimalnya Kinerja Pelayanan Penunjang Pemerintahan Kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa terdiri atas 7 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 48.227.770 dengan realisasi sebesar Rp 44.697.812 dengan tingkat capaian sebesar 92.68%.
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini bertujuan Optimalnya Kinerja Pelayanan Penunjang Pemerintahan Kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa terdiri atas 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 477.747.101 dengan realisasi sebesar Rp 472.225.596 dengan tingkat capaian sebesar 98.84%.
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini bertujuan Optimalnya Kinerja Pelayanan Penunjang Pemerintahan Kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa terdiri atas 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 69.925.000 dengan realisasi sebesar Rp 68.366.786 dengan tingkat capaian sebesar 97.77%.
- 5) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan ini bertujuan Optimalnya Kinerja Pelayanan Penunjang Pemerintahan Kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa terdiri atas 2 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.995.000

dengan realisasi sebesar Rp 1.995.000 dengan tingkat capaian sebesar 100%.

- 6) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan ini bertujuan Optimalnya Kinerja Pelayanan Penunjang Pemerintahan Kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa terdiri atas 2 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.845.365.888
- dengan realisasi sebesar Rp 1.513.565.960 dengan tingkat capaian sebesar 82.02 %.

C. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Kecamatan Sumbang
Tahun 2025

No.	NAMA PROGRAM	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 2.970.000	Rp 1.500.000	50.51
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 5.940.000	Rp 2.250.000	37.88
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 17.480.000	Rp 15.875.000	90.82
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 7.438.750	Rp 6.738.500	99,46
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 3.960.000	Rp 2.775.000	70.08
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.534.010.759	Rp 2.186.262.462	86.28
	JUMLAH	Rp 2.571.799.509	Rp 2.215.400.962	86.14%

D. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Tabel 3.8
Efektivitas Anggaran terhadap
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	
			Tujuan/Sasaran	(Rp.)	%
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	1	90,102%	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	2	61.54%	-	-
			95.07%	-	-
3	Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	2	106.62%	2.273.756.853	93.97%
			93.85%		
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	111.56%	2.186.262.462	86.28%
5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Pubilik	1	89.25%	2.250.000	37.88%
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1	111.11%	6.738.500	90,59%
7	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2	100%	15.875.000	90.82%
			100%		
8	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2	75%	2.775.000	70.08%
			75%		
9	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3	100%	1.500.000	50.51%
			100%		
			100%		
Jumlah		15		2.215.400.962	86.14%

Sumber : SIPD & Emonev Kecamatan Sumbang tahun 2025

Tabel 3.9
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
			Tujuan/Sasaran	%	
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	1	90,102%	-	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	2	61.54%	-	
			95.07%	-	
3	Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	2	106,620%	93,97%	12,650%
			93,850%		
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	111,560%	86,28%	25,280%
5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Pubilik	1	89,250%	37,88%	51,370%
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1	111,110%	90,59%	20,520%
7	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2	100%	90,82%	9,18%
			100%		9,18%
8	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2	75%	70,08%	4,92%
			75%		4,92%
9	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3	100%	50,51%	49,49%
			100%		49,49%
			100%		49,49%
Jumlah		15		86.14%	286,490%

Sumber : Emonev dan SIPD Kecamatan Sumbang 2025

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sumbang tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 2 sasaran sebagian besar telah menggunakan sumber daya secara efisien. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan***

Pada indikator **Indeks Pelayanan Publik Kecamatan** dengan nilai capaian kinerja sebesar 61.54% dan target 100%. Sementara pada indikator **Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan** capaian realisasi kinerja sebesar 95.07% dengan target 100%.

2. Sasaran ***Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan***

Pada indikator **Nilai Maturitas SPIP Kecamatan** dengan nilai capaian kinerja sebesar 106.62% dan target 100%. Sementara pada indikator **Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan** capaian realisasi kinerja sebesar 93.85% dengan target 100%.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah dicapai dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten banyumas tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2.571.799.509,- dengan angka realisasi sebesar Rp 2.215.400.962,- atau sekitar 86.14%. Dengan demikian dapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dapat mengefesiensikan anggaran sebesar Rp 356.398.547 atau sekitar 13.56%.

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sumbang Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Sumbang telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya ***dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.***

B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS

Untuk lebih meningkatkan kinerja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas ke depan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja guna mendukung pencapaian Tujuan, Visi, dan Misi Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029, maka strategi atas penyelesaian isu-isu yang akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Mendukung pelayanan dengan regulasi, sarana prasarana, sumber daya manusia, sistem, dan penganggaran demi mencapai target Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3. Penguatan peran desa maupun masyarakat dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan.
4. Menciptakan inovasi-inovasi pelayanan publik berupa gagasan, ide kreatif, adaptasi, atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat demi keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas.